



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT

JALAN AIRPORT NGURAH RAI, TUBAN, DENPASAR 80361
TELEPON (0361) 9357165, 9354204; FAKSIMILE (0361) 9354205; LAMAN kwbcbalinusra.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SUREL kwbcbalintbntt@customs.go.id

NOTA DINAS NOMOR ND-212/WBC.13/2023

Yth. : Direktur Kepatuhan Internal
Dari : Kepala Kantor
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Penyampaian Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja Tahun 2023
Tanggal : 18 Februari 2023

Sehubungan dengan Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-14/BC.08/2023 tanggal 7 Januari 2023 hal Penyusunan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja Tahun 2023, bersama ini kami sampaikan Matriks Penyelarasan Kerangka Kinerja Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Kami menyampaikan terima kasih atas dukungan kepada Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB dan NTT agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dengan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Susila Brata



MATRIK PENYELARASAN KERANGKA KINERJA TAHUN 2023
UNIT KERJA: KANTOR WILAYAH DJBC BALI, NTB DAN NTT

Visi DJBC: Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian: “Menjadi Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.
Misi DJBC: 1. Memfasilitasi perdagangan dan industry 2. Menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan illegal 3. Optimalisasi penerimaan Negara di sektor kepabeanan dan cukai
Tujuan DJBC: 1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan 2. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif 3. Penerimaan negara yang optimal 4. Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Program Kerja	Proses Bisnis	Identifikasi Risiko	Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu Anggaran	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1. Tujuan : Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif											
1.1	Dukungan terhadap perekonomian yang optimal	Presentase efektivitas asistensi UMKM berorientasi ekspor	81%	Penyelenggaraan pembinaan terhadap pelaku usaha berorientasi ekspor	Sosisalisasi dan asistensi terhadap pelaku usaha IKM	Rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap prosedur ekspor dan business matching	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp 65.861.000* [524111] Rp 65.861.000	
Tujuan : Penerimaan negara yang optimal											
2.1	Penerimaan negara dari sektor kepabea-an dan cukai yang optimal	Persentase realisasi penerimaa-n bea dan cukai	100%	1. Sinkronisasi data ekspor antara DJBC, K/L, dan Pengguna Jasa a. Analisa sektor/komoditi tertentu b. Evaluasi dan pemantauan	Monotoring dan evaluasi penerimaan setiap bulan	Realisasi penerimaan bulanan tidak mencapai trajectory atau target yang ditetapkan	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4749.BIG.001] Laporan Hasil Audit	Rp 132.600.000* [524111] Rp 132.600.000	
				2. Joint Analysis			[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp 52.130.000* [524111] Rp 52.130.000	
				3. Peningkatan kualitas penetapan/ putusan keberatan			[4788] Penanganan Keberatan/ Banding/ Gugatan	[4788.BCE] Penanganan Perkara	[4788.BCE.002] Pendampingan Penanganan Perkara Kepabea-an dan Cukai	Rp 17.020.000* [521219] Rp 6.220.000 [522151] Rp 10.800.000	
				4. Pelaksanaan evaluasi hasil putusan keberatan							



				5. Peningkatan kompetensi penanganan keberatan dengan mengikuti berbagai pelatihan (workshop, diklat, FGD) 6. Penguatan fungsi kegiatan audit kepabeanan dan cukai a. Perencanaan audit yang optimal b. Implementasi pelaksanaan kegiatan audit c. Evaluasi yang optimal atas audit yang telah dilaksanakan 7. Penguatan fungsi penelitian ulang a. Implementasi pelaksanaan kegiatan penelitian ulang b. Evaluasi yang optimal atas penelitian ulang yang telah dilaksanakan c. Peningkatan kompetensi auditor dan pemeriksa penelitian ulang dengan mengikuti berbagai pelatihan (workshop, diklat, FGD)							
2.2	Sinergi Pengawasan dan penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanaan dan cukai	78,5%	1. Pengembangan Aplikasi Pengawasan Mandiri Kepabeanan dan Cukai a. Pembuatan Aplikasi Sistem Pengawasan Terpadu (SIWASTU) b. Pembuatan Aplikasi Salam Batas (Sistem Aplikasi Mandiri Pelintas Batas 2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Wilayah Balinusra 3. Peningkatan kapasitas SDM di bidang penyidikan a. Workshop administrasi penyidikan 4. Penguatan Kegiatan Penyidikan di KPPBC	Melengkapi dokumen penyidikan	Proses penyidikan dinyatakan tidak lengkap oleh kejaksaan (Tidak P21)	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4789.BIG.004] Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp 114.719.085* [524111] Rp 114.719.085	

				a. Melakukan asistensi kegiatan penyidikan di KPPBC b. Melakukan perbantuan kegiatan penyidikan di KPPBC							
2.3	Kepuasan pengguna layanan kepatuhan dan cukai yang tinggi	Indeks kepuasan pengguna Jasa	4,34 (skala 5)	Penyusunan rencana aksi guna peningkatan kepuasan pengguna Jasa	Asisten pengisian SKPJ kepada pengguna jasa	Isian SKPJ oleh pengguna jasa tidak valid	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp 1.848.902.000* [522111] Rp 607.000.000 [522112] Rp 8.400.000 [522113] Rp 93.629.000 [523111] Rp 414.484.000 [523112] Rp 48.000.000 [523121] Rp 642.389.000 [523133] Rp 35.000.000	
								[4695.EBB] Layanan Sarana dan Prasarana Internal	[4695.EBB.002] Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Rp 602.650.000* [532111] Rp 602.650.000	
									[4695.EBB.005] Gedung/Bangunan	Rp 2.276.650.000* [533111] Rp 2.276.650.000	
2.4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas peraturan kepatuhan dan cukai	Persentase kepatuhan pengusaha Barang Kena Cukai	83%	Melaksanakan asistensi serta Monitoring dan evaluasi kepada pengusaha Barang Kena Cukai	Monitoring dan evaluasi terkait kepatuhan Pengusaha BKC.	Adanya Pelanggaran Pengusaha BKC	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggaan	Rp 19.322.000* [524111] Rp 19.322.000	
					Asistensi terkait peraturan-peraturan terbaru	Modus Penyalahgunaan fasilitas kepatuhan					
2.5	Persepsi positif dan dukungan publik terhadap kebijakan	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)	1. Pelaksanaan kegiatan FGD/ <i>Sharing Session</i> / sosialisasi terhadap pengguna jasa maupun instansi terkait tanpa mengundang narasumber yang berkompeten di	Visit Media/ coffe morning/ Press release dengan awak media	Berita negatif yang dimuat oleh media nasional terpercaya yang tidak dapat dikendalikan	[4787] Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	[4787.AEF] Sosialisasi dan Diseminasi	[4787.AEF.001] Sosialisasi dan Penyuluhan (Eksternal)	Rp 26.000.000* [521211] Rp 21.000.000 [522141] Rp 5.000.000	

	kepabea nan dan cukai			bidangnya. 2. Pelaksanaan Customs go to school/campus 3. Menyebarkan kuesioner pada saat pelaksanaan kegiatan komunikasi edukasi untuk mendapatkan feedback.		Penipuan mengatasnama kan Bea dan Cukai					
2.6	Pemeriksa an dan pengawas an kepabea an dan cukai yang efektif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeana n dan cukai	75%	1. Pelaksanaan Operasi Pengawasan BKC Illegal 2. Pengumpulan dan analisa data dan informasi terkait peredaran BKC Illegal	1. Pelaksanaa n Patroli Darat 2. Pelaksanaa n Operasi Pasar 3. Pelaksanaa n Operasi Gempur 4. Pelaksanaa n Operasi Targetting	Terjadinya Penyelundupan barang dan peredaran BKC illegal di daerah pengawasan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4789.BIG.004] Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp 215.735.915* [521219] Rp 17.150.000 [522141] Rp 96.000.000 [522191] Rp 17.150.000 [524111] Rp 85.435.915	
							[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp 737.102.000* [522119] Rp 3.216.000 [522141] Rp 45.553.000 [523111] Rp 67.708.000 [523121] Rp 33.075.000 [523191] Rp 160.000.000 [523199] Rp 427.550.000	

		Persentase efektivitas patroli laut	74%	Pelaksanaan operasi patroli laut	1. Pelaksanaa n Patroli Darat 2. Pelaksanaa n Operasi Pasar 3. Pelaksanaa n Operasi Gempur 4. Pelaksanaa n Operasi Targetting	Terjadinya pelanggaran di bidang Kepabeanan dan Cukai pada wilayah perairan laut Bali & Nusa Tenggara	[4789] Pengawasan dan Penegakan Hukum	[4789.BIG] Pemeriksaan dan Audit Penerimaan	[4789.BIG.004] Laporan Hasil Intelijen, Penindakan, dan Penyidikan	Rp 50.000.000* [524111] Rp 50.000.000	
Tujuan : Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif dan efisien											
3.1	Perencanaan dan analisis formulasi kebijakan yang efektif dan efisien	Persentase kualitas perencanaan dan penyelesaian program PRKC	80%	1. Membuat perencanaan program PRKC dan program pendukung berkelanjutan yang berkualitas 2. Penyelesaian program PRKC yang wajib dilaksanakan (<i>cascade</i>) berupa program pendukung Inisatif strategis organisasi dan Program kerja mandiri pendukung PRKC yang telah disusun dan direncanakan Melaksanakan kegiatan Monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil monitoring terhadap program PRKC yang telah disusun dan direncanakan	Menyampaik an ND Permintaan pengisian capaian setiap triwulan	Keterlambatan penyelesaian milestone PRKC dari target yang ditetapkan	-	-	-	-	
		Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanaan dan cukai	3,25 (skala 4)	1. Melaksanakan rapat pembahasan kajian di bidang kepabeanan dan cukai 2. Menyampaikan Rencana Kajian kepada Direktur Kepatuhan Internal. 3. Melaksanakan penelitian dan analisi dalam rangka penyusunan naskah kajian. 4. Menyampaikan Naskah Kajian kepada Tenaga Pengkaji.	Penyampaia n Kajian kepada tenaga pengkaji yang berkualitas	Perumusan kajian di bidang Kepabeanan dan Cukai melewati batas waktu dan tidak memenuhi kualitas yang ditetapkan	-	-	-	-	

				5. Melaksanakan presentasi dan pembahasan kajian di bidang kepabeanan dan cukai yang telah dikirim.							
3.2	Pengendalian mutu dan pengawasan internal yang bernilai tambah	Persentase tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional	84%	1. Penegakan Kepatuhan Internal a. Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC b. Pemantauan Pengendalian Intern c. Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai d. Pembinaan Mental Pegawai e. Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat f. Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas g. Investigasi Internal h. Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai	Menindaklanjuti Rekomendasi AFP	Rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional (APF) tidak ditindaklanjuti	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp 12.257.000* [524111] Rp 12.257.000	
		Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	80%	1. Edukasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal a. Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal b. Penerapan Pengendalian Intern c. Penerapan Budaya Kinerja d. Program kerja EPG 2. Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal a. Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern DJBC b. Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Fraud Risk Scenario c. Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas	Mengecek aplikasi pengaduan secara berkala	Adanya pengaduan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp 11.068.000* [524111] Rp 11.068.000	
					Edukasi dan Bimbingan teknis terkait integritas	Adanya OTT, pungli, dan korupsi yang dilakukan pegawai Bea Cukai yang ditemukan oleh Aparat Penegak Hukum					

				d. Evaluasi Pelaksanaan Investigasi Internal e. Pengelolaan Survei Organisasi Evaluasi Pengelolaan Kinerja							
3.3	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	1. Monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai a. Implementasi pemberian penghargaan b. P2KP Tahunan terkait mekanisme pemberian penghargaan c. Permintaan usulan pemberian penghargaan dari tiap-tiap Unit Eselon IV d. Pembahasan dan penilaian usulan pegawai penerima penghargaan e. Pemberian tanda penghargaan oleh Kepala Kantor f. Pengusulan pegawai penerima penghargaan yang lebih tinggi g. Penggunaan Koper Disiplin sebagai pertimbangan dalam pemberian penghargaan	Melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP) sebulan 2 kali	Rendahnya keikutsertaan pegawai dalam kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai (PKP)	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum	[4696.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp 50.000.000* [521119] Rp 50.000.000	
							[4697] Pengelolaan Organisasi dan SDM	[4697.EBC] Layanan Manajemen SDM Internal	[4697.EBC.001] Pengembangan SDM	Rp 152.568.000* [524111] Rp 152.568.000	

		Persentase efektivitas manajemen organisasi	81%	1. Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di lingkungan Kanwil DJBC BNN a. Koordinasi, komunikasi, dan asistensi dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) b. Penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) 2. Pembentukan Kantor Wilayah DJBC NTT 3. Pembentukan PSO Kupang 4. Kenaikan Tipologi KPPBC TMP C Mataram	Melakukan update secara berkala Data manajemen organisasi	Data manajemen organisasi yang tidak terupdate	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp 15.000.000* [524111] Rp 15.000.000	
3.4	Pengelolaan keuangan BMN, dan umum yang efisien, efektif dan akuntabel	Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	100 (95,52 %)	1. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran 2. Monitoring dan Evaluasi Belanja.	Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi belanja satker di Lingkungan Kanwil DJBC Bali, NTB dan NTT	Rendahnya kualitas anggaran	[4695] Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	[4695.EBA] Layanan Dukungan Manajemen Internal	[4695.EBA.003] Kerumahtanggan	Rp 250.186.000* [522151] Rp 8.000.000 [524111] Rp 242.186.000	
						Kerusakan aset BMN berupa Gedung atau Kendaraan			[4695.EBA.994] Layanan Perkantoran	Rp 1.433.066.000*	
						Kekalahan Sengketa di Pengadilan				[521111] Rp 869.360.000 [521113] Rp 33.440.000 [521114] Rp 18.000.000 [521115] Rp 111.960.000 [521119] Rp 159.660.000 [521811] Rp 48.000.000 [521832] Rp 15.000.000 [521841] Rp 2.400.000 [522141] Rp 160.500.000 [522191] Rp 9.900.000 [523121] Rp 14.846.000	